

DAFTAR PUSTAKA

a) Buku

Abdoellah, Priyatmanto, 2016, *Revitalisasi Kewenangan PTUN: Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Fajar, Mukti ND., dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Fuady, Munir, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum_Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hadjon, Philipus M., 1985, *Perlindungan Hukumbagi Rakyat di Indonesia_sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya.

_____, Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, Laica Marzuki, J.B.J.M ten Berge, P.J.J. van Buuren, F. A. A. M. Stroink, 1995, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Hajati, Sri, Ellyne Dwi Poespasari, Oemar Moechtar, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.

Harahap, M. Yahya, 2004, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan_Persidangan_Penyitaan_ Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hutagalung, Sophar Maru, 2012, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.

Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara_Buku I_Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Khairandy, Ridwan, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia (Dalam Perspektif Perbandingan_bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta.

Lopa, Baharuddin dan Andy Hamzah, 1993, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mawardi, Irvan, 2016, *Paradigma Baru PTUN_Respon Peradilan Administrasi Terhadap Demokratisasi*, Thafa Media, Yogyakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2014, *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Purwosusilo, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Ridwan HR., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Sumardjono, Maria SW., 2019, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.

Sutedi, Adrian, 2008, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tjandra, Riawan, 2014, *Hukum Sarana Pemerintahah*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

_____, 2015, *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

_____, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Yasin, Muhammad, Laode Rudita, Sad Dian Utomo, Maya Rostanty, Muhamad Imam Alfie Syarien, Nidaan Khafian, *Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Universitas Indonesia – Center for Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR), Jakarta.

b) Jurnal

Bagus Oktafian Abrianto, Xavier Nugraha, Nathanael Grady, “Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang No. 30 Tahun 2014”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 11, No. 1, Juni 2020.

Bambang Arwanto, “Perlindungan Hukum bagi Rakyat akibat Tindakan Faktual Pemerintah”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, No. 3, September 2016.

Dian Agung Wicaksono, Dedy Kurniawan dan Bimo Fajar Hantoro, “Diskursus Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Perbuatan Pemerintah dalam Pengadaan Barang dan Jasa”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 3, Desember 2020.

Fauzani, Muhammad Addi dan Fandi Nur Rohman, “Problematik Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa di Peradilan Administrasi Indonesia (Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)”, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 2, No. 1, Februari 2020.

Hartana, “Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2016.

Musa Darwin Pane, “Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24, No. 2 Desember 2017.

Richo Andi Wibowo, “Masukan Untuk RUU PBJ: Mendesain Peradilan yang Efektif Untuk Melayani Sengketa Pengadaan”, *Jurnal Pengadaan*, Vol. 4, No. 1, April 2015.

Syukron Salam, “Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa”, *Nurani Hukum*, Vol. 1, No. 1 Desember 2018.

Tri Cahya Indra Permana, “Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Ditinjau Dari Segi *Access to Justice*”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 3 November 2015.

c) Karya Ilmiah

Kamarullah, 2008, Keputusan Tata Usaha Negara yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata berdasarkan ketentuan Pasal 2 butir a Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Desertasi, Universitas Airlangga, Surabaya.

d) Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847)

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344);

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan 252K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000;

Putusan Pengadilan No. 3/G/2019/PTUN.PL; Putusan ini berisi sengketa yang melibatkan PT. Perdana Bumi Syariharti melawan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sulawesi Tengah. Objek sengketa dalam kasus ini adalah Surat Perintah Membayar Nomor: 00634/SPM-LS/PPK06/PJN.I-SULTENG / 2018, tanggal 21 Desember 2018 dan Surat Nomor: HK.02.03-Bb14/PJN I Sulteng/PPK06/437, Perihal: Pemutusan Kontrak Paket Pelebaran Jalan Ogoamas - Sibolang (MYC), tanggal 26 Desember 2018.

Putusan Pengadilan No. 14/G/2019/PTUN.PDG; Putusan ini berisi sengketa yang melibatkan PT. Spectratama Perkasa melawan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Rumah Pusat Jantung Terpadu (PJT) RSUP Dr. M. Djamil Padang. Objek sengketa dalam kasus ini adalah Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Rumah Pusat Jantung Terpadu (PJT) RSUP Dr. M. Djamil Padang, Nomor BN.01.02/I. PPK/307/2019, tanggal 18 Februari 2019, Perihal Pemutusan Kontrak.

Putusan PTUN No. 11/G/2014/PT.TUN.JKT jo. Putusan Mahkamah Agung No. 557K/TUN/2014. Sengketa ini melibatkan PT. Mitra Alumindo Selaras (Penggugat) melawan PT. Indoaluminium Intikarsa Industri, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Kakorlantas Polri) Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) sebagai Pengguna Anggaran (PA), Asisten Kapolri Bidang Sarana Dan Prasarana (ASSAPRAS). Objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI No. Kep/20/III/2014 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Bahan Baku TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Korlantas Polri TA 2014.

Putusan Pengadilan No. 34/Pdt.G/2019/PN.Tgl Jo. Putusan Pengadilan No. 204/Pdt/2020/PT SMG. Putusan Pengadilan No. 34/Pdt.G/2019/PN.Tgl berisi sengketa yang melibatkan CV. Istana Serasi (Tokhiri) melawan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Peningkatan JL. Bawal Cs Perangkat Daerah Kota Tegal, Tahun anggaran 2019 ; Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tegal ; PT Nisajana Hasna Rizqy. Putusan ini berisi gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, yang dilakukan oleh Tergugat karena mengeluarkan keputusan yang memenangkan Turut Tergugat II (PT Nisajana Hasna Rizqy) yang dinilai bertentangan dengan PERMEN PUPR NO 07/PRT/M/Tahun 2019. Oleh karena Putusan Hakim kemudian menolak eksepsi tergugat dan menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I yang memenangkan Turut Tergugat II (PT Nisajana Hasna Rizqy) dengan kode Tender 1545048 dengan Nama Tender Pemilihan Peningkatan Jalan Bawal CS adalah PMH, maka tergugat kemudian mengajukan banding, akan tetapi hakim dalam Putusan No. 204/Pdt/2020/PT SMG kemudian menguatkan Putusan PN Tegal.

e) Internet

Azizah, *Era Baru Menuju Badan Peradilan Yang Modern*, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3365/era-baru-menuju-badan-peradilan-yang-modern>, diakses 10 April 2021.

Diolah penulis berdasarkan informasi jumlah PT-TUN dan PTUN yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/ptun-medan.html>, diakses 10 April 2021

Diolah penulis berdasarkan informasi dari profil hakim tiap PTUN di Indonesia. contoh: profil hakim PTUN Yogyakarta yang diolah penulis. Berdasarkan <https://www.ptun-yogyakarta.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/profile-pegawai.html>, jumlah hakim PTUN Yogyakarta ada 11 orang.

Tri Jata Ayu Pramesti, Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan, Hukumonline, 17 Desember 2014, diakses pada 10 November 2020 di laman <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>.

Buku Saku Implementasi Peraturan Presiden Perpres No. 16 Tahun 2018, Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, Modul Perpres No. 16 Tahun 2018, diakses 13 November 2020 pada laman <https://bagianpbj.kutaiarakab.go.id/2019/05/17/buku-saku-implementasi-peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018-tentang-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/>.